

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
DESA BALAYO KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh :

**OWIN SALEH
NIM : E21 19 252**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
DESA BALAYO KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

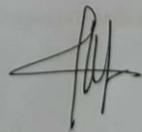
**OWIN SALEH
E21.19.252**

SKRIPSI

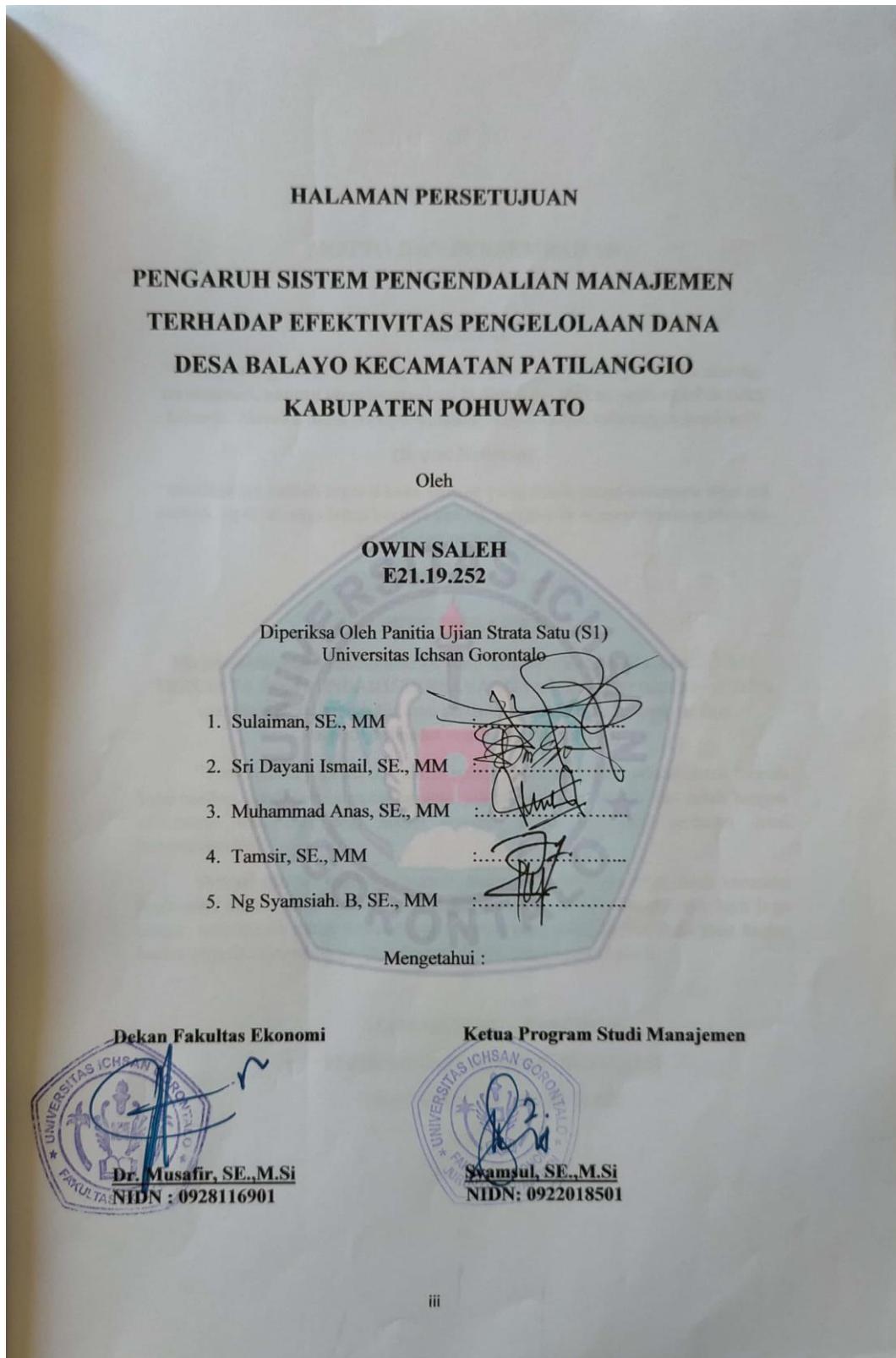
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 03 November 2021

PEMBIMBING I

TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403

PEMBIMBING II

NG SYAMSIAH, B, SE., MM
NIDN : 0921018003



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 03 November 2021

Yayataan



Owin saleh
E21.19.252

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”***. direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Syamsiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Uyan Oka, Selaku Kepala Desa pada Desa Balayo, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Aarin, Selvi, Ranny, Rawi, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,03 November 2021

(Penulis)

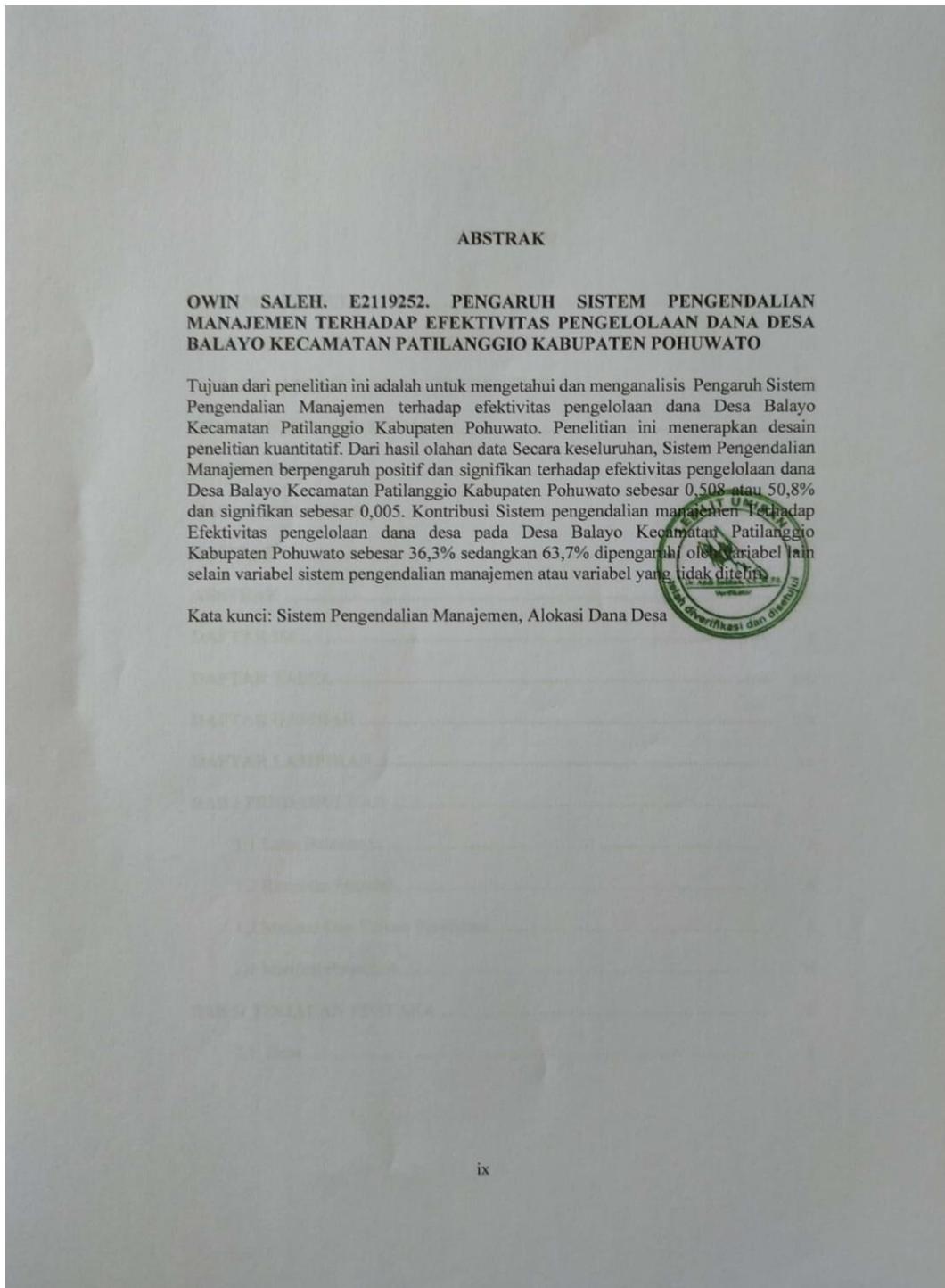
ABSTRACT

OWIN SALEH. E2119252. THE EFFECT OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF FUND MANAGEMENT AT BALAYO VILLAGE, PATILANGGIO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

The purpose of this study is to find out and analyze the effect of the Management Control System on the effectiveness of fund management at Balayo Village, Patilanggio Subdistrict, Pohuwato District. It applies a quantitative design of the research method. Based on the results of overall data analysis, the Management Control System has a positive and significant effect on the effectiveness of fund management at Balayo Village, Patilanggio Subdistrict, Pohuwato District by 0.508 or 50.8% and is significant by 0.005. The contribution of the management control system to the effectiveness of village fund management at Balayo Village, Patilanggio Subdistrict, Pohuwato District is 36.3%. The value of 63.7% is influenced by variables unexamined.

Keywords: Management Control System, Village Fund Allocation





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Desa	8

2.1.1. Pengertian Desa	8
2.1.2. Pemerintah Desa	9
2.1.3. Otonomi Desa	10
2.2. Sistem Pengendalian Manajemen	13
2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen	13
2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen	14
2.2.3. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Manajemen	16
2.2.4. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen	20
2.2.5. Struktur Sistem Pengendalian Manajemen	23
2.3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	28
2.3.1. Pengertian Efektivitas	28
2.3.2. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	29
2.3.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	37
2.4. Kerangka Pikir	40
2.5. Hipotesis	40
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	41
3.1. Objek Penelitian.....	41
3.2. Metode Penelitian	41
3.2.1. Desain Penelitian	41
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	42
3.2.3. Populasi dan Sampel	43
	44

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	45
3.2.5. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Balayo	48
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Balayo	49
4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	50
4.2.1. Tanggapan Responden pada Pengelolaan Dana Desa	54
4.2.2. Tanggapan Responden pada Sistem Pengendalian Manajemen.....	58
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian	42
Tabel 3.2. Tabel Skala Likert	45
Tabel 4.1. Daftar Pemerintahan Desa Balayo	47
Tabel 4.2. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	49
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Dimensi Transparan	50
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Dimensi Akuntabel	51
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Dimensi Partisipasi	52
Tabel 4.6. Tanggapan Responden Dimensi Struktur	54
Tabel 4.7. Tanggapan Responden Dimensi Proses	55
Tabel 4.8. Tanggapan Responden Dimensi Penghargaan	57
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Item SPM	59
Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Item Pengelolaan Dana Desa	60
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.9. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Pikir	40
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	67
<i>Lampiran 2 Kuisioner</i>	68
<i>Lampiran 3 Tabulasi Data</i>	72
<i>Lampiran 4 Output SPSS-16</i>	74
<i>Lampiran 5 Distribusi Nilai R Tabel</i>	75
<i>Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian</i>	76
<i>Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian</i>	77
<i>Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi</i>	78
<i>Lampiran 9 Hasil Turnitin</i>	79
<i>Lampiran 10 Curriculum Vitae</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang bersinggungan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan

pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya akuntabilitas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik, baik berupa laporan kinerja maupun laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna, agar dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas, karena informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai

adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya.

Dana Desa setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Penetapan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara.

Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan. Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya. Untuk itu dalam rangka penyelenggraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Sistem Pengendalian Manajemen. Dari fenomena diatas maka untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mencegah melemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, pengawasan melalui Sistem Pengendalian Manajemen sebelum menyalurkan informasi keuangan desa kepada publik.

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) adalah hal yang penting dalam pengendalian formal dan sistem umpan balik yang dimaksudkan untuk memonitor hasil organisasi dan mengoreksi penyimpangan standar dari kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu mekanisme secara formal didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil (*output*) yang diinginkan dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui visi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Sehingga dapat dikatakan

sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi.

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat organisasi yang penting untuk menunjang kinerja optimal dari suatu organisasi. Untuk menentukan keberhasilan dan pengembangan yang berkelanjutan, maka organisasi saat ini harus memiliki sistem yang baik dan tenaga kerja yang berkualitas, sistem yang baik salah satunya adalah sistem pengendalian manajemen yang optimal. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya demi mencapai tujuan yang telah diterapkannya, optimalisasi, peningkatan profit secara terus menerus. Hal ini adalah keharusan bagi organisasi yang ingin menjadi leader dalam bidangnya.

Ada beberapa elemen dalam sistem pengendalian manajemen yaitu Pelacak atau sensor, Penaksiran (*assessor*), Pengubah (*Effector*) dan Jaringan komunikasi. Suatu perusahaan yang telah berjalan sebaiknya memantau seluruh kegiatan operasionalnya. Sebuah pengendalian digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan organisasi. Pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengelolaan dan penerapan pengendalian internal yang baik maka suatu organisasi akan lebih mudah dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

“Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan dana desa, terutama dalam hal pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Bagi Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang pengelolaan dana desa berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3)

udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa atau pembantu desa.

Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan

pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.2. Sistem Pengendalian Manajemen

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Supriyono (2000:27), sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Sedangkan menurut pendapat Mulyadi (2007: 5), bahwa di masa lalu (tahun 1960-an sampai dengan 1990-an), sistem perencanaan dan pengendalian manajemen (*management planning and control system*) lebih dikenal dengan sebutan sistem pengendalian manajemen (*management control system*).

Anthony dan Dearden (2003:20) mengemukakan bahwa Suatu sistem merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Pengendalian manajemen adalah proses dimana seorang manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian manajemen difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktifitas yang terus berulang.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:20) yang diterjemahkan oleh F.X Kurniawan mendefinisikan sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktifitas suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:4) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus. Sedangkan menurut Mulyadi (2007:3) mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan suatu operasi perusahaan agar strategi dan kebijakan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses.

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:109) yang dialihbahasakan oleh Kurniawan dan Krista tujuan utama dari Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut : Memastikan (sejauh mungkin) tingkat keselarasan tujuan (*goal congruence*) yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2013:7) bahwa tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah:

1. Diperolehnya keandalan dan integrasi informasi
2. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
3. Melindungi harta perusahaan
4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.

Keempat hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Diperolehnya keandalan dan intergrasi informasi

Di era globalisasi ini, sistem informasi sangat penting bagi organisasi dalam rangka menanggapi perubahan yang serba cepat atas perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnya kecanggihan sarana teknologi informasi untuk mengambil keputusan. Umumnya, sistem informasi dibagi dua aspek yaitu :

- a. Informasi akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan organisasi dan berbagai laporan lainnya seperti penggunaan anggaran;

- b. Sistem informasi kegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspek kegiatan yang menghasilkan laporan tingkat keberhasilan kinerja.

2. Kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Kegagalan ketaatan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan usaha koordinasi yang dirancang dalam suatu sistem pengendalian.

3. Melindungi harta perusahaan

Pada umumnya pengendalian disusun dan diimplementasikan untuk melindungi harta perusahaan. Contoh : sebuah pengendalian terhadap perusahaan adalah dikuncinya pintu gudang penyimpanan barang, direkturnya satpam, digunakannya pasword komputer, dibagunnya pagar, ditempatkannya harta berharga pada tempata yang tidak mudah diakses orang yang tidak berhak/berwenang.

4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien

Sumber daya bersifat terbatas mendorong organisasi menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi adalah memperoleh hasil yang maksimal dengan masukan (input) tertentu atau mencapai hasil tertentu dengan biaya yang minimal. Standar operasi seharusnya memberikan kriteria pengukuran untuk menilai tingkat keekonomisan dan efisiensi. Dalam dunia bisnis, kriteria penilaian kehematan dan efisiensi tercermin dalam laporan keuangannya. Namun demikian, bagi organisasi nirlaba, termasuk organisasi pemerintah, kriteria penilaian dituangkan dalam bentuk indikator keberhasilan kinerja.

2.2.3. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3) yang dialihbahasakan oleh Kurniawan Tjakrawala mendefinisikan bahwa elemen-elemen/komponen Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Pelacak (*detector*) atau sensor
- b. Penilai (*assessor*)

- c. *Effector*
- d. Jaringan komunikasi.

Keempat hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Pelacak (*detector*) atau sensor

Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.

- 2. Penilai (*assessor*)

Suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.

- 3. *Effector*

Suatu perangkat (yang sering disebut “umpulan balik”) yang mengubah perilaku jika *assessor* mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.

- 4. Jaringan komunikasi

Perangkat yang meneruskan informasi antara *detector*, *assessor* dan *effector*.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:9) bahwa komponen sistem pengendalian manajemen terdiri dari lima, yaitu sebagai berikut :

- a. Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya.
- b. Pemisahan tugas.
- c. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan dan pengeluaran.

- d. Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting.
- e. Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut :

1. Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya

Faktor paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan yang dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Karyawan dikatakan ideal apabila tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingkat perputaran karyawan yang terlalu tinggi sering menimbulkan permasalahan dalam pengendalian manajemen. Karyawan baru yang belum berpengalaman memiliki potensi membuat kesalahan dibandingkan dengan karyawan lama yang telah berpengalaman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu karyawan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal disamping memiliki etika yang tinggi.

2. Pemisahan tugas Pemisahan tugas merupakan aspek penting lainya.

Terdapat 3 jenis tanggung jawab fungsi yang harus dilaksanakan oleh bagian atau paling tidak orang yang berlainan, yaitu :

- a. Otorisasi untuk melaksanakan transaksi.
- b. Pencatatan Transaksi.
- c. Penyimpanan Aktiva.

3. Pemisahan tugas/fungsi tersebut bertujuan supaya tidak ada seorang karyawan yang merangkap untuk mengendalikan dua atau tiga tanggung jawab tugas/fungsi sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagi organisasi.
4. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan dan pengeluaran. Setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan di lingkungan organisasinya. Demikian juga setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan, melaksanakan dan memelihara serta meningkatkan sistem pengendalian manajemennya. Manajemen harus menentukan ukuran besaran tertentu secara bertingkat untuk setiap jenjang dalam sistem pencatatannya dan prosedur pengawasan untuk persetujuannya. Sistem pemberian wewenang tersebut dapat bersifat umum dan dapat didelegasikan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Tetapi wewenang yang sifatnya sangat penting masih perlu dipegang oleh manajemen tertinggi.
5. Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting. Pengendalian atas harta, catatan dan dokumen organisasi memiliki tujuan menghindari adanya kesalahan dan ketidak beresan dari karyawan yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pembatasan wewenang pada karyawan tertentu. Sedangkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dilakukan dengan melaksanakan

penyimpangan secara baik terhadap formulir-formulir yang sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan.

6. Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Periksa fisik merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian, oleh sebab itu manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodik dengan bukti yang independen tentang keberadaan fisik dan kewajaran penilaian atas transaksi yang telat dicatat. Pencatatan secara periodik ini dapat meliputi: penghitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank dan teknik lainnya untuk menentukan apakah catatan telah sesuai dengan fisik.

Sedangkan menurut Mulyadi (2007:16) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian manajemen terdiri atas dua komponen yaitu Sistem pengendalian manajemen terdiri atas dua komponen yaitu struktur sistem dan proses sistem. Dimana struktur sistem terdiri atas struktur organisasi, jejaring informasi, dan sistem penghargaan. Sedangkan Proses sistem terdiri atas enam tahap yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, pengimplementasian, dan pemantauan.

2.2.4. Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen meliputi baik tindakan-tindakan untuk memotivasi dan menuntun usaha guna mencapai tujuan organisasi, maupun tindakan-tindakan untuk meengoreksi pekerjaan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda, tetapi semuanya mempunyai karakteristik.

Menurut Anthony, Govindarajan (2005:15) yang dialihbahasakan oleh agus maulana mengemukakan bahwa karakteristik sistem pengendalian manajemen terdiri atas:

1. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab
2. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri atas: (a) data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar (b) data aktual mengenai apa yang telah dan yang sedang terjadi
3. Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan dimana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam suatu moneter
4. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi
5. Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu Pengendalian manajemen meliputi baik tindakan-tindakan untuk memotivasi dan menuntun usaha guna mencapai tujuan organisasi, maupun tindakan-tindakan untuk meengoreksi pekerjaan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda, tetapi semuanya mempunyai karakteristik.

Anthony, Govindarajan (2005:15) yang dialihbahasakan oleh agus maulana mengemukakan bahwa karakteristik sistem pengendalian manajemen terdiri atas:

1. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab
2. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri atas: (a) data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar (b) data aktual mengenai apa yang telah dan yang sedang terjadi
3. Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan dimana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam suatu moneter
4. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi
5. Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu
6. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinasi dimana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan yang dapat dipadukan untuk saling dibandingkan setiap saat pada setiap unit organisasi.

Sedangkan menurut Edy Sukarno (2000:6) mengungkapkan bahwa karakteristik sistem pengendalian manajemen terdiri atas:

1. Fokus Sistem pengendalian manajemen adalah program dan pusat-pusat tanggungjawab
2. Jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan data aktual. Data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar. Data aktual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi baik dalam ataupun diluar organisasi

3. Sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua aspek-aspek operasi organisasi. Adanya fungsi manajemen untuk menjaga keseimbangan semua bagian operasi dan mengoperasikan organisasi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi.

2.2.5. Struktur Sistem Pengendalian Manajemen

Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai tujuan individual yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan yang diputuskan dalam proses perencanaan strategik. Menurut Mulyadi (2007:9) pengertian struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem.

Menurut Mulyadi (2007:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri atas tiga komponen sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi
2. Jejaring Informasi
3. Sistem Penghargaan.

Penjelasan dari struktur sistem pengendalian manajemen diatas adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah komponen utama dalam struktur sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi merupakan sarana untuk

mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pada waktu organisasi menghadapi lingkungan stabil dan kompetisi tidak begitu tajam, kekuasaan dalam organisasi terpusat di tangan manajemen puncak dan delegasi wewenang kepada manajemen tingkat bawah dilaksanakan secara terbatas.

Struktur yang sesuai dengan lingkungan bisnis pada zaman itu adalah struktur organisasi fungsional hierarkis. Untuk menghadapi lingkungan bisnis turbulen (perubahan menjadi konstan, pesat, radikal, serentak dan pervasif), yang dialamnya customer memegang kendali bisnis (sehingga kompetisi memperebutkan pilihan *customer* menjadi sangat tajam, diperlukan struktur organisasi yang berorientasi kepada *customer*, yang secara cepat mampu merespon kebutuhan *customer*, yang secara fleksibel mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, yang secara terpadu memenuhi kebutuhan *customer* dan yang mendorong inovasi.

2. Jejaring Informasi

Dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaring organisasi (*organization network*) untuk kepentingan penyediaan layanan bernilai tambah bagi *customer*. Teknologi informasi menjadi pemampu (*enabler*) untuk membangun jejaring informasi yang memungkinkan terjadinya hubungan yang berkualitas (*quality relationship*) antar karyawan, antara manajer dengan karyawan, antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, dan antara perusahaan dengan *customernya*. Untuk menghadapi lingkungan bisnis stabil, organisasi perusahaan mampu

menghadapi perusahaan sendiri secara independen, tanpa harus membangun jejaring organisasi dengan organisasi lain. Untuk menghadapi lingkungan bisnis kompetitif dan turbulen, organisasi harus kohesif-bersatu sangat erat diantara manajemen dan karyawan.

Di samping itu, untuk menghadapi persaingan yang tajam, organisasi harus berupa jejaring organisasi yang terpadu. Oleh karena itu, kemampuan manajemen dalam membangun jejaring informasi yang menyatukan berbagai komponen jejaring organisasi merupakan penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya-menghasilkan nilai terbaik bagi *customer*. Untuk membangun struktur sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis turbulen, diperlukan jejaring informasi yang mengikat secara erat melalui hubungan berkualitas.

3. Sistem Penghargaan

Komponen struktur sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah sistem penghargaan-suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi. Pada waktu organisasi herarkis fungsional digunakan oleh perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis stabil, penghargaan didistribusikan ke manajemen puncak, karena mereka lah yang *running the business* perusahaan. Pada waktu lingkungan bisnis berubah menjadi turbulen, manajemen puncak tidak lagi mampu menjalankan sendiri seluruh bisnis perusahaan.

Beban tanggung jawab untuk *running the business* perusahaan perlu didistribusikan kepada karyawan. Timbulah kebutuhan untuk memberdayakan

karyawan guna membangun *responsibility-based organization* suatu organisasi yang seluruh personelnya (manajemen dan karyawan) bertanggung jawab atas beroperasi perusahaan. Diperlukan sistem penghargaan yang tidak didasarkan pada posisi (*position-based reward*), namun telah didasarkan pada kinerja (*performance-based reward*). Di samping itu, kinerja personel tidak hanya dinilai dari perspektif keuangan, namun lebih dari itu, perlu dinilai dari berbagai perspektif nonkeuangan, sehingga kinerja personel dapat bersifat komprehensif.”

2.2.6. Proses Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Mulyadi (2007:10) pengertian proses sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut: Proses sistem merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan sistem.

Selanjutnya Mulyadi (2007:10) menyebutkan bahwa proses sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri atas enam tahap utama sebagai berikut :

1. Perumusan strategi,
2. Perencanaan strategik,
3. Penyusunan program,
4. Penyusunan anggaran,
5. Pengimplementasian,
6. Pemantauan.

Sedangkan Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:19) menyatakan bahwa proses sistem pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis

2. Persiapan anggaran

3. Pelaksanaan

4. Evaluasi kinerja

Penjelasan dari empat proses diatas sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam siklus pengendalian manajemen. Dalam perusahaan yang menggunakan kalender tahunan, perencanaan biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang mendahului tahun anggaran. Pada waktu itu keputusan yang mempertimbangkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak perencanaan strategis terakhir dibuat.

2. Persiapan anggaran

Proses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer setiap pusat tanggung jawab dengan atasannya. Produk akhir dari negosiasi ini adalah suatu pernyataan persetujuan atas biaya yang diantisipasi untuk tahun yang akan datang, atau laba yang direncanakan atau ekspektasi dari tingkat pengembalian investasi.

3. Pelaksanaan

Dalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari satu program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Laporan atas

pusat tanggung jawab akan menunjukkan informasi yang dianggarkan dan informasi aktual, ukuran kinerja finansial dan nonfinansial.

4. Evaluasi kinerja

Proses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Jika keadaan yang diasumsikan dalam proses anggaran berubah, maka terdapat perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual. Jika keadaan berubah, maka perubahan ini diperhitungkan. Pada akhirnya, analisis mengarah ke kritik yang konstruktif bagi para manajer dari pusat tanggung jawab.

2.3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membawa hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Harbani Pasolong (: 4) Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Martani dan Lubis (2007:55) efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Insrawijaya dalam Novi (2015:45) efektivitas adalah suatu program kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dicapai.

2.3.2 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan: Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber Dana Desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Dana Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendeklegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12)

menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media piñata usahaan berupaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan Dana Desa ialah kegiatan mengatur Dana Desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keungan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan piñata usahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang

disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penata usahaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penata usahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan

- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

- 1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.3.3. Asas Pengelolaan Dana Desa.

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

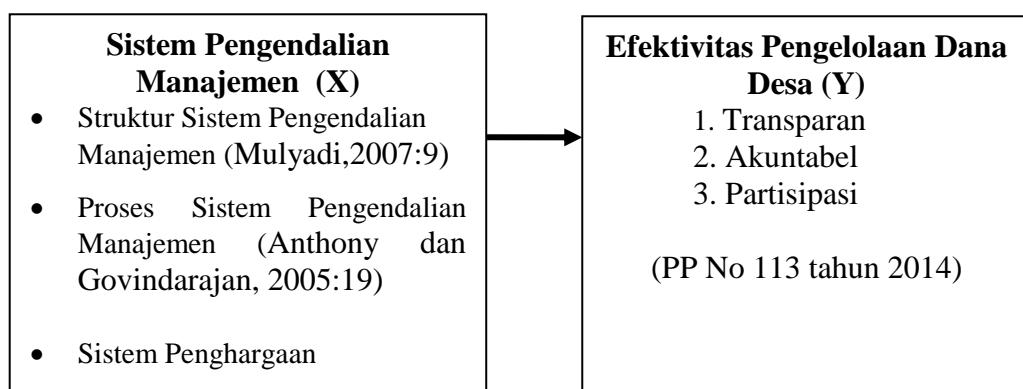
Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.4. Kerangka Pikir

Sugiyono (2008:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1. : Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “ Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai

dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas pengelolaan dana desa (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem pengendalian manajemen (X).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1. Transparan	1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh 2. Pengumuman pengelolaan

(PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014)	<p>2. Akuntabel</p> <p>3. Partisipasi</p>	<p>keuangan dapat meningkatkan transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan 4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab 1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan 2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan 3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut 4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan 1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa 3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa 4. Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa
<p>Sistem Pengendalian Manajemen (Mulyadi,2007:9) & Anthony dan</p>	<p>1. Struktur SPM</p> <p>2. Proses SPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi 2. Pendeklegasian wewenang 3. Pusat pertanggungjawaban 4. Pengukuran kinerja 5. Sistem informasi dan komunikasi. 1. Perencanaan strategis

Govindarajan (2005:19)	3. Sistem Penghargaan	2. Penyusunan anggaran 3. Pelaksanaan 4. Evaluasi 1. Pentingnya penghargaan bagi seorang manajer 2. Penghargaan yang diberikan memenuhi kebutuhan hidup 3. Bobot pekerjaan Jam kerja 4. Penghargaan yang diberikan mencerminkan kontribusi manajer 5. Frekuensi penerapan sistem penghargaan dalam suatu perusahaan
---------------------------	-----------------------	--

3.2.3. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat pada Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 20 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2014:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber, dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden, meliputi identitas dan tanggapan responden (Sugiyono, 2014:61).

Sedangkan untuk data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014:62). Data sekunder umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan sebagai gambaran pelengkap ataupun untuk diperoses lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3.2. Skala Likert

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated item-Total Correlation* dengan nilai *r table*, untuk *degree of freedom* (*df*)=*n*-2, dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel dan *alpha* = 0,05. Menurut Ghazali (2016:53) Jika *r* hitung lebih besar dari *r table* dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach Alpha. Menurut Ghazali (2016:48) suatu instrument dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,70.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan maka kami menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Efektivitas Pengelolaan Dana Desa)

X = Variabel independent (Sistem Pengendalian Manajemen)

a = Koefisien regresi (Konstanta)

b = Koefisien regresi

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Balayo.

Desa Balayo adalah pemekaran dari desa Buntulia utara yang sebelumnya merupakan suatu dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun dengan jumlah 200 KK 1.040 jiwa kemudian Dusun Balayo dimekarkan pada tahun 1994, yang menjadi Pejabat sementara adalah Almarhum Bapak T.W Bumulo sebagai kepala desa Buntulia utara, pada tahun 1995.

Desa Balayo menjadi desa definitif dan peresmiannya dipusatkan di Kabupaten Bolaan Mongondow berdasarkan SK GUB. KDH TKT I Sulut oleh Bapak E.E Mangendaan.

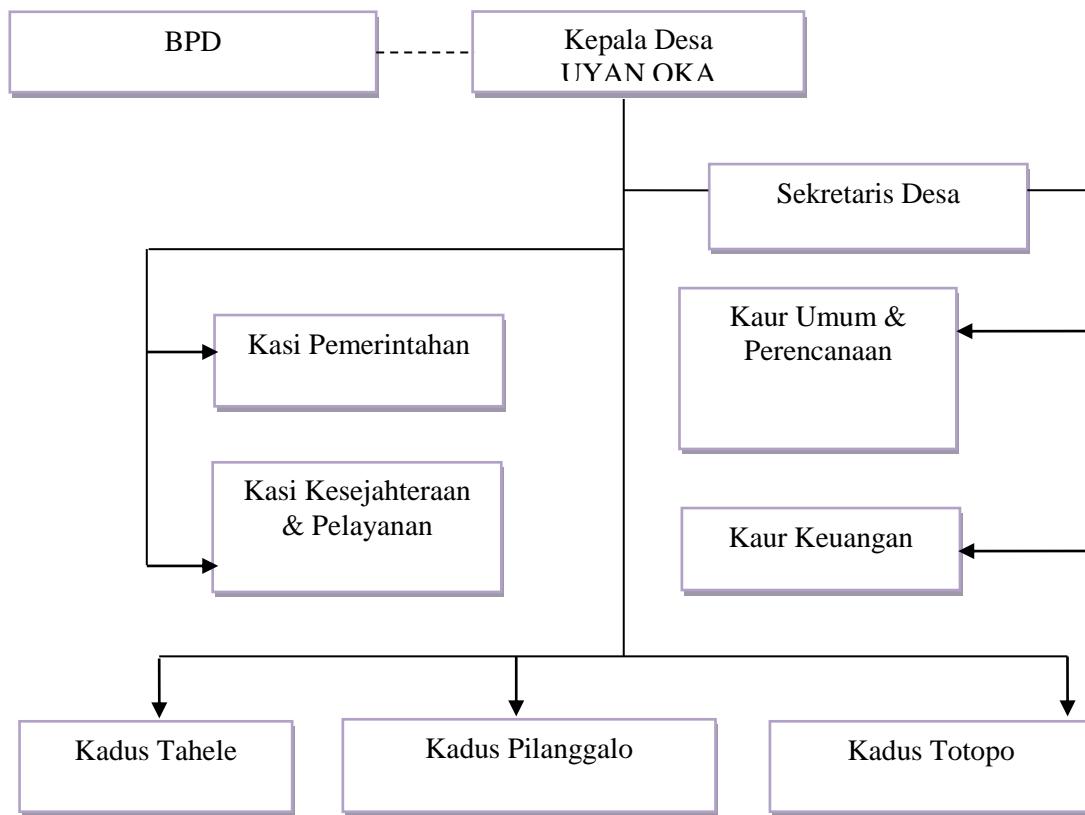
Nama Balayo adalah merupakan sejenis rumput yang ditemukan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan anyaman tikar pada waktu itu. Desa Balayo terdiri dari tiga dusun yaitu; Dusun Tahele, Pilanggalo, dan Totopo.

Tabel 4.1. Pemerintahan Desa Balayo periode 1994 – 2022

No	Periode	Kepala Desa	Keterangan
1	1994 - 1998	T.W Bumulo	-
2	1998 - 6 bln	Ibrahim Nota/Sila	PLH
3	1998 - 2002	Rozten Ilato	KADES
4	2002 - 2007	Hamzah Patila	KADES
5	2007 - 2008	Sarton Hulopi	PLH
6	6 bulan	Masmud U. Ibrahim	PLH
7	2008 - 2014	Rivai Nyoma, SE	KADES
8	2014 - 2015	Romi Usman, S.Ip	PLH
9	2016 - 2022	Uyan Oka	KADES

Adapun batas-batas Desa Balayo adalah, untuk batas bagian utara berbatasan langsung dengan hutan lindung dan batas bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Taluduyunu sedangkan batas bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Padengo kemudian untuk batas disebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Dudepo.

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Balayo.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini variabel X adalah sistem penegendalaian manajemen sedangkan variabel terikat yaitu efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

$$\text{Skor terendah} = \text{Bobot terendah} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 20 = 20$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 20 = 100$$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{100 - 20}{5} = 16$$

Tabel 4.2.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
87 – 100	Sangat Baik
70 – 86	Baik
54 – 69	Kurang Baik
37 – 53	Tidak Baik
20 – 36	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021

4.2.1. Tanggapan Responden pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Tanggapan Responden Pada Variabel
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pertanyaan Dimensi Transparan**

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	10	50	50	10	50	50	11	55	55	11	55	55
4	8	32	40	9	36	45	7	28	35	7	28	35
3	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
2	1	2	5	0	0	0	1	2	5	1	2	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	87	100	20	89	100	20	88	100	20	88	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 87. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan item 1 tentang kemudahan memperoleh akses dokumen pengelolaan Dana Desa yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 89. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan item 2 tentang peningkatan transparansi pengelolaan Dana Desa yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang

sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang transparansi positif pengelolaan Dana Desa yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang informasi yang bertanggung jawab yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4.4. Tanggapan Responden Pada Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pertanyaan Dimensi Akuntabel

Bobot	Item 5			Item 6			Item 7			Item 8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	10	50	50	10	50	50	11	55	55	11	55	55
4	8	32	40	9	36	45	7	28	35	7	28	35
3	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
2	1	2	5	0	0	0	1	2	5	1	2	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	87	100	20	89	100	20	88	100	20	88	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

5. Pertanyaan pada item 5 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 87. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang rencana strategi pengelolaan Dana Desa yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
6. Pertanyaan pada item 6 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 89. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100)

yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang indikator hasil kerja yang ada pada variabel variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.

7. Pertanyaan pada item 7 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan unsur unit kerja yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
8. Pertanyaan pada item 8 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang pertimbangan utama dalam pengelolaan Dana Desa yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Pada Variabel

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pertanyaan Dimensi Partisipasi

Bobot	Item 9			Item 10			Item 11			Item 12		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	11	55	55	11	55	55	11	55	55	10	50	50
4	7	28	35	7	28	35	7	28	35	8	32	40
3	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
2	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	88	100	20	88	100	20	88	100	20	87	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

9. Pertanyaan pada item 9 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang keterlibatan masyarakat yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
10. Pertanyaan pada item 10 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang masukan masyarakat kepada BPD yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
11. Pertanyaan pada item 11 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan masyarakat dalam sistem pengendalian manajemen yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.
12. Pertanyaan pada item 12 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 87. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang penilaian masyarakat yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) dengan indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 88 dan masuk kategori sangat baik.

4.2.2. Tanggapan Responden pada Sistem pengendalian manajemen (X)

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6.
Tanggapan Responden pada Variabel
Sistem pengendalian manajemen Pertanyaan Dimensi Struktur

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4			Item 5		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	17	85	85	12	60	60	10	50	50	8	40	40	13	65	65
4	3	12	15	7	28	35	10	40	50	12	48	60	7	28	35
3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	97	100	20	91	95	20	90	100	20	88	100	20	93	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 97. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang manfat organisasi yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 91. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100)

yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang berjalannya organisasi yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.

3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 90. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang pemahaman organisasi yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang penerapan *jobdesc* yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
5. Pertanyaan pada item 5 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 93. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 5 tentang pusat pertanggungjawaban yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.

Tabel 4.7.

**Tanggapan Responden pada Variabel
Sistem pengendalian manajemen Pertanyaan Dimensi Proses**

Bobot	Item 6			Item 7			Item 8			Item 9		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	14	70	70	14	70	70	17	85	85	13	65	65
4	6	24	30	6	24	30	3	12	15	7	28	35

3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	94	100	20	97	100	20	93	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

6. Pertanyaan pada item 6 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 94. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang kesesuaian program dengan perencanaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
7. Pertanyaan pada item 7 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 94. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan item 2 tentang perencanaan organisasi dalam menyusun anggaran yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
8. Pertanyaan pada item 8 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 97. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 120 – 140) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang perbandingan anggaran dan realisasinya yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
9. Pertanyaan pada item 9 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 93. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang

sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang penilaian kinerja yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.

Tabel 4.8.
Tanggapan Responden pada Variabel
Sistem pengendalian manajemen Pertanyaan Dimensi Penghargaan

Bobot	Item 10			Item 11			Item 12			Item 13			Item 14		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	14	70	70	17	85	85	12	60	60	10	50	50	8	40	40
4	6	24	30	3	12	15	7	28	35	10	40	50	12	48	60
3	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20	94	100	20	97	100	20	91	100	20	90	100	20	88	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

10. Pertanyaan pada item 10 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 94. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang pentingnya penghargaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
11. Pertanyaan pada item 11 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 97. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan item 2 tentang pemberian penghargaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
12. Pertanyaan pada item 12 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 91. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang

sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang bobot pekerjaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.

13. Pertanyaan pada item 13 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 90. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang kontribusi pimpinan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.
14. Pertanyaan pada item 14 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 88. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 87 – 100) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 5 tentang frekuensi penerapan penghargaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel kualitas laporan keuangan (X) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel sistem pengendalian manajemen (X) yaitu rata-rata sebesar 93 yang masuk kategori sangat baik.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen kuisioner yang terdiri dari variabel sistem pengendalian manajemen sebanyak 14 item pertanyaan dan variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa sebanyak 12 item pertanyaan. Dari pengujian realibilitas teknik *split half* nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran variabel dengan tingkat reliabilitas yang kuat (koefisien rata-rata di

atas 0,60) dengan koefisien internal Spearman Brown. Menurut Ghozali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Batas minimum realibilitas yang dapat diterima adalah koefisien positif dan makin tinggi koefisiennya berarti makin handal instrumen pengukurnya.

2. Uji Validitas

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila $r = 0,3$. Sehingga apabila dikorelasikan antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil olahan data diperoleh r-tabel sebesar 0,444.

Adapun hasil uji validitas item pertanyaan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Item Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X)

No Item	Tingkat Validitas		Kategori
X1	0,746	0,444	Valid
X2	0,619	0,444	Valid
X3	0,749	0,444	Valid
X4	0,647	0,444	Valid
X5	0,545	0,444	Valid
X6	0,855	0,444	Valid
X7	0,855	0,444	Valid
X8	0,746	0,444	Valid
X9	0,545	0,444	Valid
X10	0,855	0,444	Valid
X11	0,746	0,444	Valid
X12	0,619	0,444	Valid
X13	0,749	0,444	Valid
X14	0,647	0,444	Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel sistem pengendalian manajemen (X) berada di atas 0,444 maka jika dibandingkan r-hitung > r-tabel berarti valid semua dan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Item Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No Item	Tingkat Validitas		Kategori
Y1	0,981	0,444	Valid
Y2	0,949	0,444	Valid
Y3	0,988	0,444	Valid
Y4	0,947	0,444	Valid
Y5	0,981	0,444	Valid
Y6	0,949	0,444	Valid
Y7	0,947	0,444	Valid
Y8	0,988	0,444	Valid
Y9	0,988	0,444	Valid
Y10	0,947	0,444	Valid
Y11	0,988	0,444	Valid
Y12	0,981	0,444	Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) berada di atas 0,444 maka jika dibandingkan r-hitung > r-tabel berarti valid semua dan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

3. Analisis Reliabilitas

Berdasarkan pengujian realibilitas teknik *split half* nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran variabel dengan tingkat reliabilitas yang kuat (koefisien rata-rata di atas 0,6) dengan koefisien internal Spearman Brown. Menurut Ghazali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Reliabilitas variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Kriteria	Kategori
Pengawasan (X)	0,764	0,60	Reliabel
Pengelolaan Alokasi dana Deas (Y)	0,788	0,60	Reliabel

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa, semua variabel masuk dalam kategori reliabel karena nilai reliabilitas hitung $> 0,60$. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan cocok sebagai alat ukur yang memiliki tingkat kestabilan yang kuat, dalam artian alat ukur tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian instrumen tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap.

4. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	.112	27.826		.004	.997
Sistem Pengendalian Manajemen	.810	.428	.407	1.893	.075

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Olahan Data, 2021

Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (α) sebesar 0,112, sedangkan nilai sistem pengendalian manajemen (β /koefisien regresi) sebesar 0,810. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya adalah:

$$Y = 0,112 + 0,810X$$

Dari hasil olahan data, maka diperoleh persamaan regresi sederhana dimana nilai constant 0,112 yang artinya jika sistem pengendalian manajemen diabaikan maka efektivitas pengelolaan Dana Desa sebesar 0,112.

Koefisien regresi sistem pengendalian manajemen (X) sebesar 0,810 hal ini berarti bahwa perubahan variabel sistem pengendalian manajemen (X) akan diikuti oleh perubahan efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,810.

Berdasarkan nilai hasil regresi pada tabel di atas, dimana nilai t_{tabel} sebesar $1,893 < t_{hitung} 2,086$ dan nilai $Sig_{hitung} 0,075 > Sig_{0,05}$ menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian manajemen (X) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, sehingga hipotesis penelitian ditolak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pengendalian manajemen (X) berpengaruh positif sebesar 0,810 namun tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran

Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi saran adalah sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato mempertahankan sistem pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain, selain sistem pengendalian manajemen yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Adisty C. (2012). Asuhan Gizi Nutritional Care Process. Yogyakarta
- Anthony, Dearden, Bedford. 2003. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Revisi,
Alih Bahasa oleh Agus Maulana, Erlangga, Jakarta.
- Anthony, R., Vijay Govindrajan, (2005), Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 11
Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Chung, N. T., *et all.* 2015. *Impact of Seasonal Climate Variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia.*
- Drs. R. A. Supriyono, S. U, 2000, Akuntansi Manajemen, Edisi ketiga, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Edy Sukarno, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
penerbit ERLANGGA, Jakarta.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuagn Desa, Gosyen Publishing,Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat, Jakarta.
- Kumaat, Valarey G. (2011). Manajemen Audit. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit Rmbooks.
Jakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2007. Akuntansi Biaya, Edisi ke 3. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.

- Alfabeta. Bandung.
- _____. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D". Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas, 2013, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Indeks, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
- _____, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Manajemen.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- _____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja. 2003. Otonomi DaerahPT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta 2007.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Lampiran 1**JADWAL PENELITIAN**

Kegiatan	Tahun 2021									
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi										
Usulan Judul										
Penyusunan Proposal & Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

Lampiran 2**KUISIONER**

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”. Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

**Owin Saleh
NIM E2119252**

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					
No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS

1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

B. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (X)

No	Struktur Sistem Pengendalian Manajemen	SS	S	KS	TS	STS
1	Struktur Organisasi menetapkan pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.					
2	Struktur Organisasi telah berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu jalannya operasi di dalam organisasi.					
3	Departemen atau divisi dalam organisasi memahami dengan baik dan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.					
4	Penerapan Job description yang jelas berdasarkan wewenang dan tanggung jawab setiap posisi dalam organisasi.					
5	Di dalam organisasi terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban.					

No	Proses Sistem Pengendalian Manajemen	SS	S	KS	TS	STS
1	Program yang telah dijalankan sesuai dengan strategi yang dijabarkan dalam perencanaannya.					
2	Organisasi membuat perencanaan dengan penyusunan anggaran.					
3	Pihak manajemen melakukan perbandingan antara anggaran biaya dengan realisasi anggaran biaya.					
4	Penilaian kinerja sering dilakukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi.					

No	Proses Sistem Penghargaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Organisasi sangat memahami pentingnya penghargaan bagi seorang pimpinan					
2	Penghargaan yang diberikan oleh organisasi memenuhi kebutuhan hidup pimpinan					
3	Bobot pekerjaan sebanding dengan jam kerja yang ada					
4	Penghargaan yang diberikan mencerminkan kontribusi pimpinan terhadap organisasi					
5	Frekuensi penerapan sistem penghargaan dalam organisasi sesuai harapan					

Lampiran 3**TABULASI DATA**

N. o	Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	57
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	55
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	38
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	51

No.	Variabel Sistem Pengendalian Manajemen (X)														Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	68
4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	61
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
7	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	66
8	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	66
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
10	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	66
11	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	64
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
13	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	64
14	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	59
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
16	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	56
17	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	68
18	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	58
19	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	64
20	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	63

Lampiran 4

OUTPUT SPSS-16

Lampiran 5

**DISTRIBUSI NILAI R TABEL
PADA SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%**

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail:lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.:19195/PIP/LEMLIT-UNISAN/VII/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

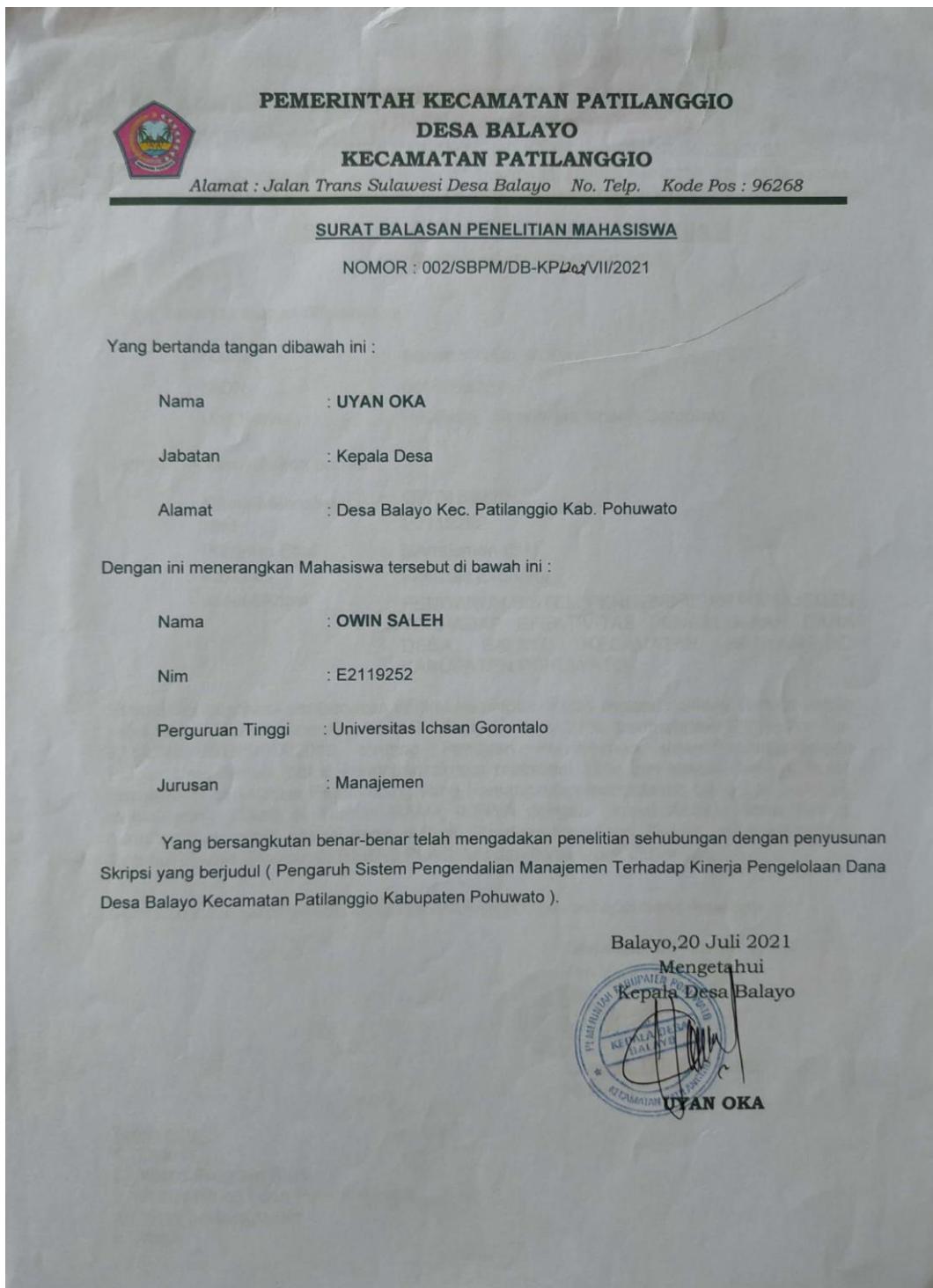
Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

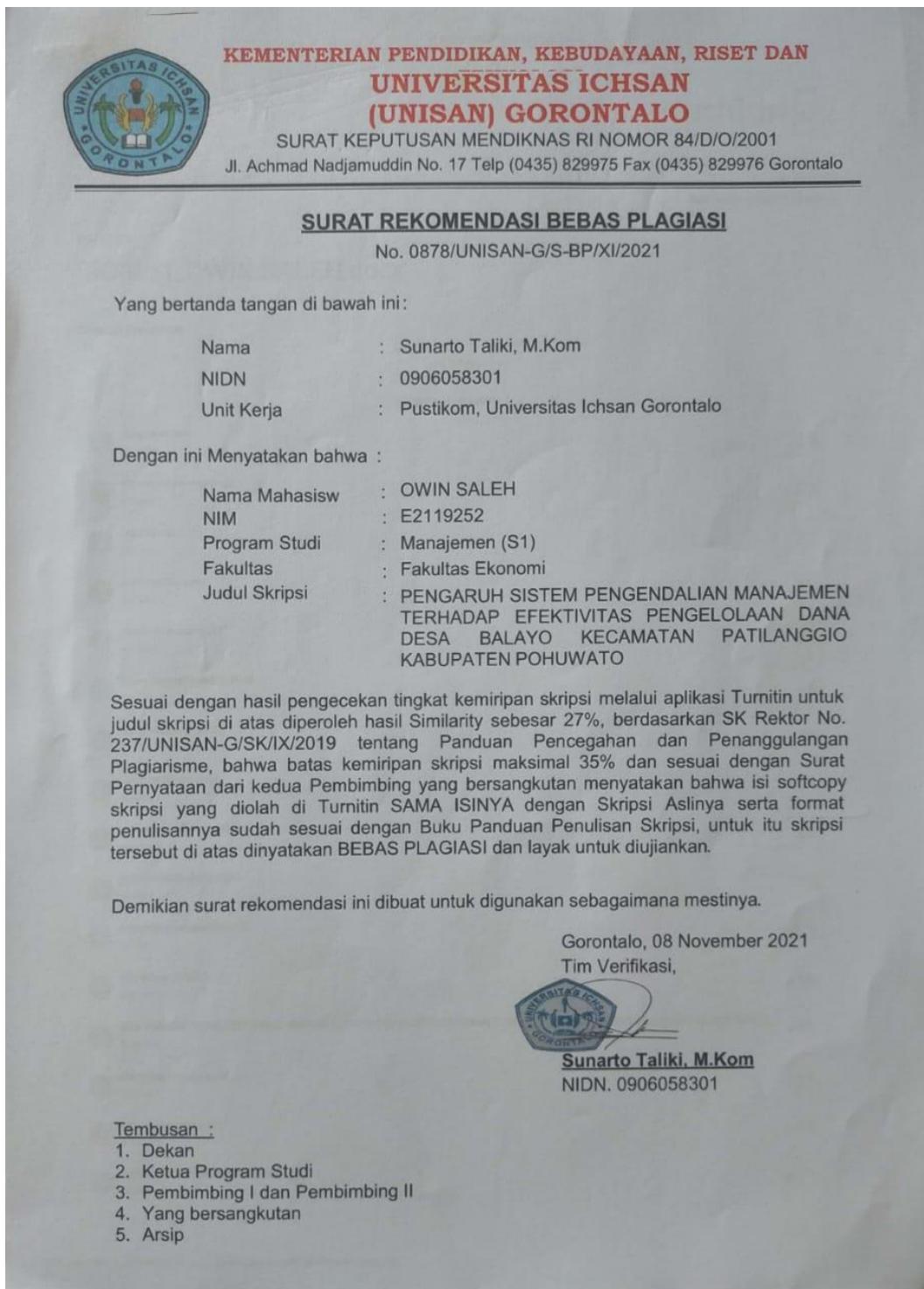
Nama Mahasiswa : Owin Saleh
NIM : E21.19.252
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian : Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

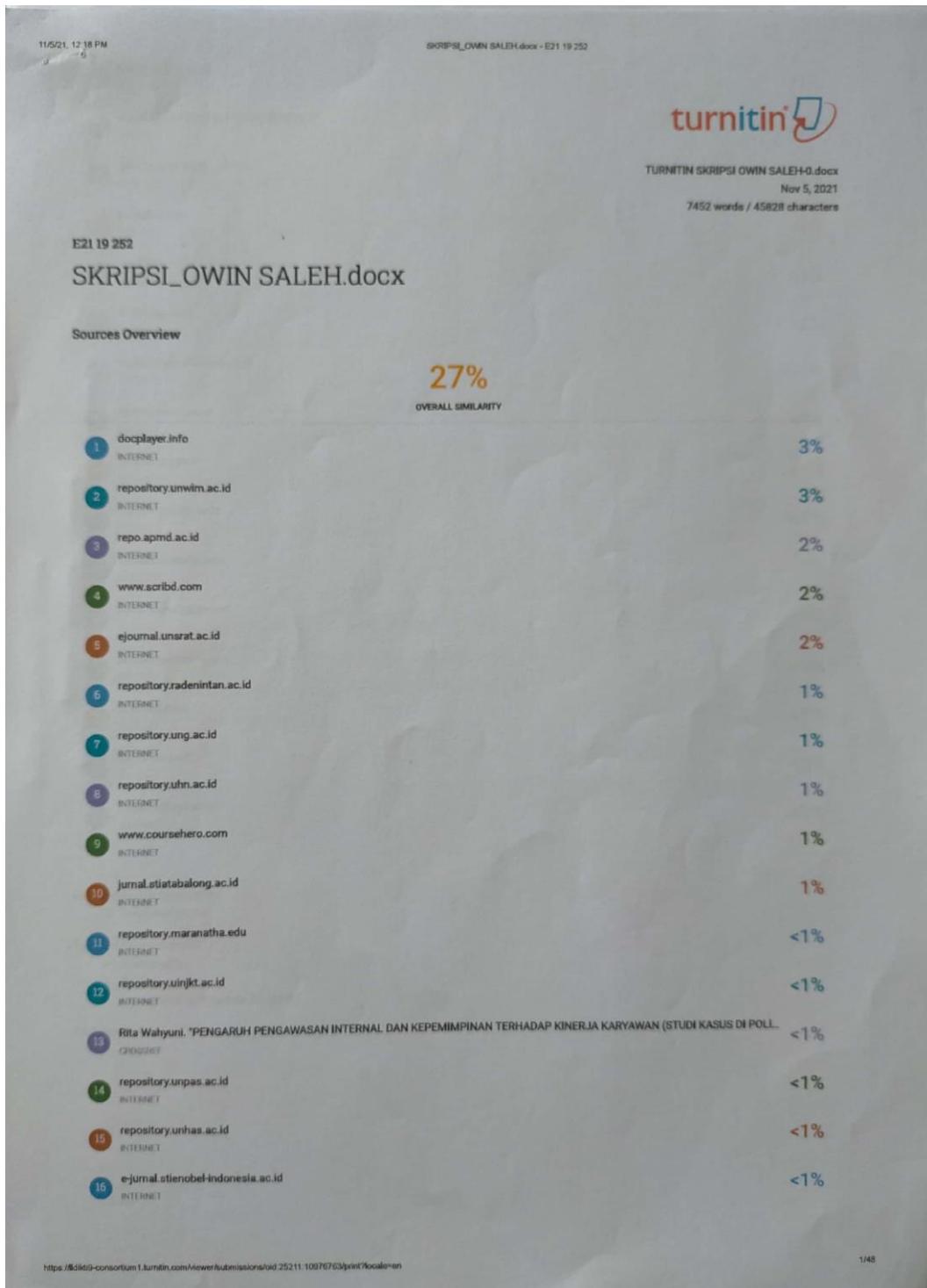
Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

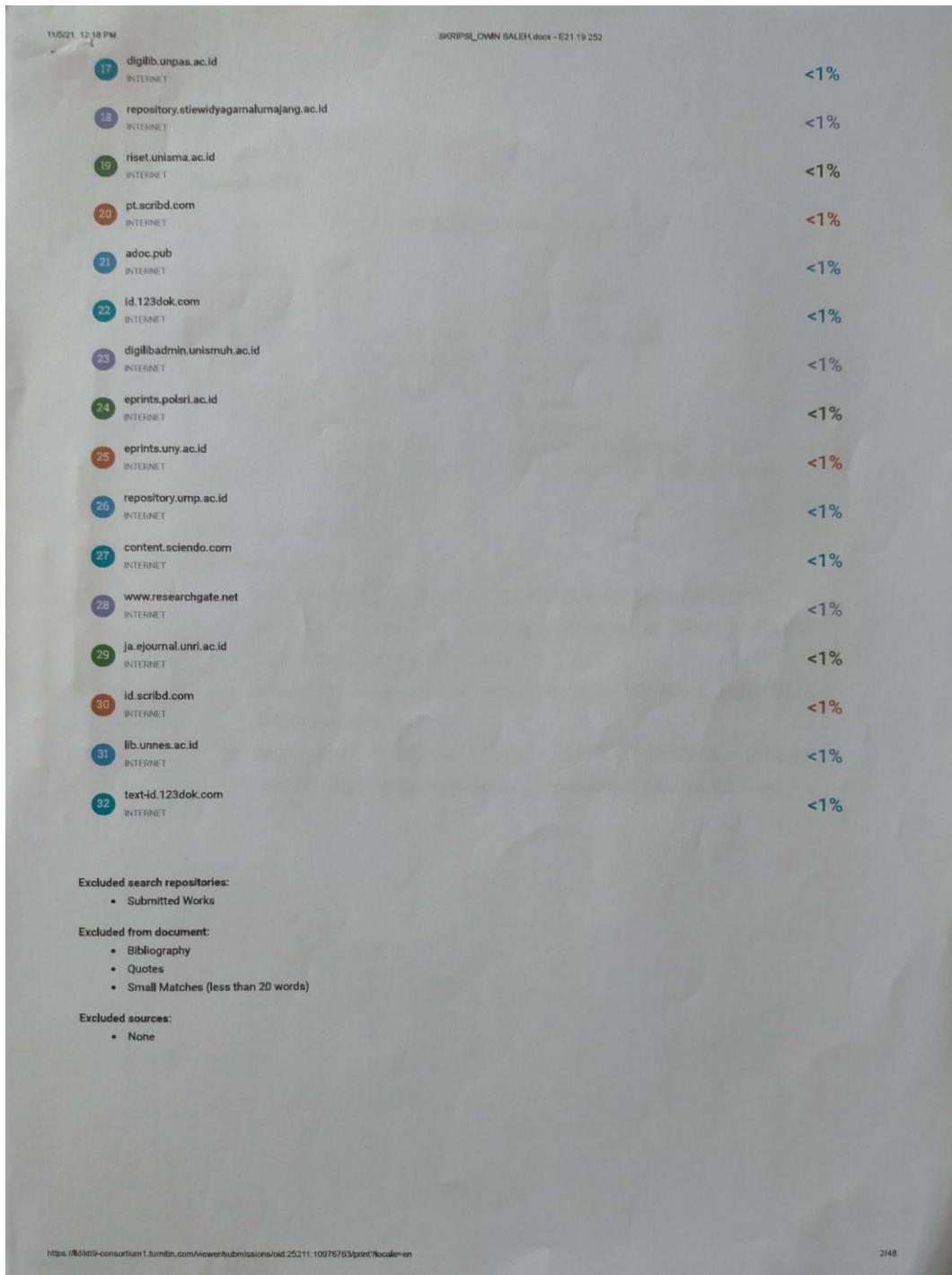
Gorontalo, 02 Juli 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104









CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	: OWIN SALEH
NIM	: E21.19.252
Tempat/Tgl Lahir	: Balayo, 11-11-1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan
Alamat	: Desa Balayo, Kec. Patilanggio Kab.
Pohuwato	

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 02 PATILANGGIO pada tahun 2011.
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di SMP 3 SATAP PATILANGGIO pada tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGRI 1 BUNTULIA pada tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.